

POLITIK PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013-2015

Oleh : Khairi Rahmi

Email : rahmi_khairi@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

During this time 50% of local revenue Kabupaten Bintan comes from the tourism sector. Revenue from tourism comes from taxes and retribution restaurants and hotels in the area of international tourism in Lagoi. Other tourist attractions are also contributing, but not as much Lagoi. In the years 2013 to 2015 is estimated at more than 50% contribution Bintan regional revenue derived from this Lagoi tourist area.

The first purpose of the research, to explain the political management of attractions in Bintan regency between the government and foreign parties in 2013-2015 second, to explain the impact of the involvement of foreign parties in the management of attractions in Bintan regency. The approach used in this study is a qualitative approach. Type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study is documentation and interviews. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis.

Management of tourism development is still concentrated in Lagoi tourism area that is closed system. The correlation that exists between the government and the PT. BRC particularly in managing Tourism Regions Lagoi very strong. Management of tourism conducted by the Department of Tourism and Culture District of Bintan is felt not maximized because of the apparent absence of implementation significantly, despite being made the Regional Tourism Development Master Plan. The impact that a threat is if the investor wants more foreign workers than local experts, therefore, the government is expected to encourage and improve the skills of the local workforce.

Keywords: Management of tourism, Tourism Regions Lagoi, Political Economy

Sehubungan dengan relevansi pertumbuhan dan kemajuan yang dicapai di sektor pariwisata secara nasional, maka sebaiknya jika mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan memerlukan perluasan perumusan program. Khususnya dalam segi peningkatan pendapatan dan strategi pengembangannya yang berkorelasi terhadap usaha pemanfaatan komponen aset atau kekayaan daerah yang tersedia di Kabupaten Bintan yang mempunyai potensi alam cukup besar untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Selama ini sebesar 50% pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari sektor pariwisata. Pendapatan dari sektor pariwisata berasal dari pembayaran pajak dan retribusi restoran dan hotel di kawasan pariwisata berskala internasional di Lagoi. Tempat wisata lainnya juga memberi kontribusi, namun tidak sebesar Lagoi. Pada tahun 2013 hingga 2015 diperkirakan lebih dari 50% sumbangan Pendapatan Asli Daerah Bintan berasal dari kawasan wisata Lagoi ini, sedangkan PAD dari sektor sektor pertambangan, pertanian, industri dan kelautan masih berada diurutan di bawah pendapatan dari sektor pariwisata.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009-2015

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2009	127.950.244.262	132.757.180.295,56
2010	119.808.991.100	130.846.899.962,84
2011	121.436.408.714	136.232.925.611,22
2012	130.138.946.500	136.274.546.432,36
2013	134.088.654.257	136.077.603.306,04
2014	158.959.953.600	167.196.747.853,00
2015	176.000.000.006	178.384.571.161,00

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tentang APBD dari Tahun

Terkait dengan semakin besarnya kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan aset negara atau secara spesifik adalah manajemen aset daerah, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan instrument yang tepat untuk melakukan pengelolaan manajemen aset objek wisata daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif muli dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pengawasannya.¹

Namun ada beberapa fenomena yang terjadi terkait dengan pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bintan yaitu sebagai berikut:

1. Keterlibatan Pihak Asing

Kawasan Wisata Lagoi Bintan juga dikenal sebagai Kawasan Bintan Beach International Resorts (BBIR) merupakan kawasan wisata bahari dan *resort* yang dikelola dan dikembangkan oleh PT. Bintan Resorts Cakrawala yang terletak di kawasan Lagoi. Kerjasama pengembangan kawasan wisata ini sudah dimulai sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2004. Kawasan Wisata Lagoi Bintan diresmikan pada 18 Juli 1996 oleh Presiden Soeharto (Indonesia) dan Perdana Menteri Goh Chok Tong (Singapura) sebagai salah satu agenda kerjasama Indonesia-Singapura dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi. Sebelumnya, ketika Kabupaten Bintan masih bagian dari provinsi Riau, pada tanggal 28 Agustus 1990, dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dalam perjanjian *Framework Agreement on Regional Economic Cooperation*).²

Hubungan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bintan dan pihak asing dikuatkan dengan lahirnya peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah

¹ Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm. 237.

² *Sejarah PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC)*. Diakses dari www.Bintan-Resort.com, pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 14.15 WIB.

Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, membuat kondisi Kawasan Wisata Lagoi di Kabupaten Bintan menjadi kawasan FTZ (Free Trade Zone) atau kawasan perdagangan bebas. Sejak awal dibuka hingga sekarang, Kawasan Wisata Lagoi telah menggunakan dolar (dollar Singapura dan dollar Amerika Serikat) sebagai alat bertransaksi. Kawasan wisata Lagoi menjadi sangat krusial di Kabupaten Bintan, dikarenakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan sangat tergantung dari sektor pariwisata khususnya dari Kawasan Wisata Lagoi.

Tabel 1.2 Kontribusi Kawasan Wisata Lagoi Terhadap PAD Kabupaten Bintan dari Penarikan Pajak dan Retribusi Tahun 2013-2015

No.	Pajak dan Retribusi	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	49.432.344.969	56.962.396.124	55.351.779.940,26
2	Pajak Restoran	24.109.901.280	28.067.097.762	26.567.881.089,12
3	Pajak Hiburan	1.194.734.100	1.208.811.673	1.669.705.742,02
5	PBB		10.148.816.969	11.311.052.282,00
6	Pajak Parkir	238.673.000	239.982.302	207.718.677,00
7	Retribusi Pelabuhan			2.599.440.000,00
	Jumlah	74.975.653.349	96.627.104.830	95.368.081.730,14

Sumber: Laporan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013-2015

Dikarenakan adanya kerjasama dengan pihak asing dan ditambah Bintan merupakan kawasan perdagangan bebas atau sering disebut FTZ (*Free Trade Zone*) membuat sebagian besar dari aset pariwisata yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Bintan pengelolaannya didominasi oleh pihak swasta dan asing. Hal ini menyebabkan pemerintah hanya mendapatkan hasil dari pajak dan retribusinya.

Di sisi lain aset pariwisata yang dikelola oleh pihak asing kurang bisa dinikmati oleh turis lokal (nusantara), dikarenakan tarif yang ditetapkan oleh pihak swasta mengikuti kurs mata uang

asing. Pemerintah hanya memikirkan bagaimana cara menarik turis asing untuk berkunjung di objek pariwisata yang dikelola oleh pihak swasta dan asing yang mengesampingkan turis lokal sehingga turis lokal lebih memilih untuk berkunjung ke objek wisata yang dimiliki oleh daerah lain atau bahkan negara tetangga yang diperkirakan lebih terjangkau.

2. Konflik Harga Ganti Rugi Tanah Masyarakat

Terkait dengan pembebasan lahan di Kawasan Lagoi yang dulu merupakan tanah hak milik rakyat. Harga ganti rugi yang tidak sesuai membuat masalah ini berlarut-larut sampai sekarang. Selain itu Pemerintah sendiri tidak ada langkah penyelesaian. Untuk data warga yang masih belum diganti rugi juga tidak ada data yang jelas. Berikut data dari Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bintan:³

Tabel 1.4 Luas Tanah Ganti Rugi Masyarakat Tahun 2013

Luas Tanah Diklaim oleh PT.BRC	23.000 hektar
Tanah Memiliki Hak Guna Bangunan	16.000,17 hektar
Tanah Status Kepemilikannya Tidak Jelas	7000 hektar

Sumber: Data Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013

Kemudian, dari penjelasan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan masih bertumpu pada sektor pariwisata khususnya pada Kawasan Wisata Lagoi,

³ Herni Marina, 2013, Jurnal *Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Lagoi Kabupaten Bintan*. Hlm. 29.

sehingga pemerintah tidak melihat potensi dari aset pariwisata lainnya.

2. Terjadinya dominasi pihak asing dalam pengelolaan pariwisata dan masih bergantungnya pemerintah Kabupaten Bintan pada pihak pengelola asing karena strategi dan kemampuan pengelolaan pariwisata dirasa masih rendah.
3. Objek wisata yang dikelola oleh pihak asing hanya dapat dirasakan oleh turis mancanegara dan turis lokal yang berasal dari kalangan atas. Hal ini disebabkan oleh pembayaran yang mengikuti kurs dollar.

Oleh karena alasan yang dipaparkan di atas, ketika sektor pariwisata di kawasan Lagoi dijadikan sebagai tumpuan utama pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan sehingga membuat pemerintah tidak melihat potensi dari aset pariwisata lainnya. Saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan titik fokus pada pengelolaan objek wisata. Maka saya mengambil judul “Politik Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bintan Tahun 2013-2015.”

Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas mengenai politik pengelolaan objek wisata oleh pemerintah Kabupaten Bintan maka yang menjadi pertanyaan dalam perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana politik pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bintan antara pemerintah dan pihak asing pada tahun 2013-2015?
2. Bagaimana dampak keterlibatan pihak asing dalam

pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bintan?

Kerangka Teori

1. Pengelolaan

Pengelolaan secara umum diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan menurut para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengelolaan dari berbagai aspek. Namun jika pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni:⁴

- a. Murniati : proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai tujuan khusus yang diterapkan dalam suatu organisasi.
- b. Moekijat :rangkaiian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- c. Prajudi : pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Selajutnya jika dilihat dari tujuan pengelolaan dalam pariwisata yang lebih lanjut demi meningkatkan kemakmuran secara serasi dan seimbang bisa tercapai seoptimal mungkin apabila pemerintah ikut berperan dalam perencanaan dan

⁴ Skripsi Jeffry Kusharyadi, 2016, *Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Siak Kabupaten Siak*. Jurusan Ilmu Administrasi: Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau. Hlm. 18-20.

pengelolaan pariwisata. Peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata sangat menentukan berkembangnya tidaknya suatu objek wisata dapat dilihat dari hal penyediaan infrasturuktur dan memperluas jaringan kerja aparatur pemerintah dalam bekerjasama dengan pihak swasta. Selain itu pemerintah berpartisipasi dalam hal penentuan kebijakan, pengambil keputusan dan pengawasan. Kemudian menurut Luther Gullick, dalam pengelolaan terdapat fungsi manajemen yaitu: (i) perencanaan (*planning*), (ii) pengorganisasian (*organizing*), penyusunan pegawai (*staffing*), (iii) koordinasi (*coordination*), (iv) pelaporan (*reporting*), (v) anggaran (*budgeting*), (vi) pengawasan (*controlling*).⁵

Menurut Mahmudi, terdapat permasalahan dalam pengelolaan aset atau kekayaan daerah adalah sebagai berikut:⁶

- a. Belum dilakukan inventarisasi seluruh aset daerah;
- b. Belum dilakukan penilaian (*appraisal*) atas seluruh aset daerah;
- c. Terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang (secara tidak langsung) oleh berbagai pihak;
- d. Ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset, seperti tanah, jalan, jembatan, dan sebagainya;
- e. Aset daerah tersebut terkait dengan kepentingan yang berasal dari berbagai institusi pemerintah dan non-pemerintah; dan
- f. Lemahnya koordinasi dan pengawasan atas pengelolaan aset daerah.

2. Ekonomi Politik

Pada pelaksanaannya kegiatan politik dapat menimbulkan konflik, hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik maupun nalurinya yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya sanga mendalam dan sering saling bertentangan. Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji, atau seperti dirumuskan oleh Peter Merkl sebagai berikut: politik, dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri. Singkatnya, politik adalah perebutan kuasa, takhta, dan harta.⁷

Menurut Rod Hague politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama yang dikemukakan oleh Andrew Heywood.⁸

Selanjutnya menurut Morgenthau mengartikan politik sebagai perjuangan untuk mendapat kekuasaan; seni dan ilmu tentang pemerintahan yaitu menurut Schattschneider; pola-pola kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan oleh Dahl; dan menurut Crick politik adalah konsiliasi dari pihak-pihak yang bertentangan melalui kebijakan publik (dalam buku Deliarnov, 2006, *Ekonomi Politik*. Hlm. 6).

Ada tiga konsepsi tentang politik masing-masing mempunyai konsep inti

⁵ Alam, 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 102.

⁶ Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Gelora Aksara Pratama Hlm.158.

⁷ Miriam Budiarto, 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Hlm.6.

⁸ *Ibid.*,

dan *home domain* tersendiri. Sehubungan dengan ketiga pemaknaan tersebut, Caporaso dan Levine menyimpulkan bahwa politik merujuk pada aktivitas-aktivitas dan institusi-institusi yang terkait dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif publik untuk masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Berikut tiga konsepsi tentang politik:⁹

- a. Jika politik diartikan sebagai pemerintah, politik adalah mesin politik formal negara secara keseluruhan (mencakup institusi-institusi, hukum-hukum, kebijakan-kebijakan, dan aktor-aktor kunci). Jadi, politik disini mencakup semua aktivitas, proses, dan struktur pemerintah. Dalam pendekatan politik sebagai pemerintah, politik didefinisikan sebagai organisasi, aturan-aturan, dan keagenan (*organization, rules, and agency*). Organisasi merujuk pada struktur-struktur yang kongkret (pengadilan, badan logistik, birokrasi, dan partai-partai politik). Aturan-aturan merujuk pada hak dan kewajiban, termasuk prosedur-prosedur dan strategi-strategi yang akan digunakan dalam proses politik.
- b. Jika politik diartikan sebagai publik, politik merujuk pada peristiwa-peristiwa yang melibatkan banyak orang. Cara terbaik untuk memahami politik sebagai publik ialah dengan membedakan antara privat dengan publik. Seperti diketahui, privat merujuk pada peristiwa-peristiwa yang secara substansial terbatas pada individu-individu atau kelompok-kelompok yang secara langsung terlibat dalam pertukaran.
- c. Jika politik diartikan sebagai otoritas pengalokasian, arti politik dan ekonomi menjadi mirip, sebab

keduanya dimaksudkan sebagai metode alokasi. Proses ekonomi dan politik merupakan cara alternatif dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang langka. Artinya, politik di sini tidak merujuk pada struktur formal pemerintah, melainkan sebagai suatu cara tertentu dalam pengambilan keputusan tentang produksi dan pendistribusian sumber-sumber. Berbeda dengan alokasi ekonomi yang lebih menekankan pada pertukaran secara sukarela, sistem alokasi politik lebih mengandalkan otoritas.

Secara sederhana Mas'ood mendefinisikan ekonomi politik sebagai studi yang menganalisis masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat adanya dua lembaga paralel "negara" dan "pasar" dan interaksi yang dinamik diantara keduanya dalam dunia modern. Ekonomi politik memusatkan perhatian pada konflik mendasar antar kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dimana individu itu berada. Menurut Khairul Anwar, ekonomi politik adalah persoalan yang muncul akibat ketegangan yang terjadi antara pasar, dimana individu terlibat dalam mengejar kepentingan sendiri, dengan negara dimana orang-orang yang sama melakukan tindakan kolektif demi kepentingan masyarakat.¹⁰

Yanuar Ikbar menyatakan bahwa Ekonomi politik mempunyai telaah luas pada konteks terdapatnya hubungan saling memengaruhi antara faktor ekonomi dan faktor politik yang menimbulkan efek tertentu dalam kehidupan masyarakat, sekaligus pula membawa umpan balik bagi

⁹ Deliarnov, 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 7.

¹⁰ Khairul Anwar, 2011. *Ekonomi-Politik (Formulasi Kebijakan dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru: Penebit Alaf Riau . Hlm. 4.

variabel-variabel subjeknya. ekonomi politik dianggap sebagai keseluruhan sistemnya, dan politik ekonomi sebagai elemennya yang *applicable*. Politik ekonomi, terutama adalah upaya untuk mengantisipasi pelbagai perkembangan perekonomian yang tidak seimbang melalui tindakan-tindakan pencegahan, perbaikan terhadap gangguan-gangguan keseimbangan yang penting.¹¹

Seperti yang diapaparkan di atas, maka tidak dipungkiri lagi bahwa ekonomi politik erat hubungannya dengan kebijakan publik. Dimana disiplin Ilmu Ekonomi Politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi politik seperti produksi, investasi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya. Penelusuran mendalam tentang Ekonomi politik biasanya didekati dengan format dan pola hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian pembahasan Ekonomi politik jelas erat kaitannya dengan kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi, dan implementasi kebijakan.¹²

Prinsip pengambilan keputusan dalam ekonomi (efisiensi) sering atau bisa bertentangan dengan pengambilan keputusan dalam politik. Hal ini bisa saja menyebabkan adanya interaksi antara keputusan ekonomi dan politik. Hal ini mengingat masyarakat bukan hanya sebagai konsumen dan produsen, melainkan juga sebagai Warga Negara dengan berbagai afiliasi politiknya. Dengan kekuatan politiknya mereka tidak hanya dapat mengatur pasar, melainkan dapat pula mengambil alih secara langsung sumber daya yang ada di negaranya. Dalam kaitan ini, hal ini dapat dikatakan ekonomi tidak bisa membuat prediksi

ekonomi tanpa membuat prediksi tentang respons politik yang mungkin bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Oleh karena itu, usaha untuk mengefisiensikan birokrasi dan sektor publik umumnya dilakukan dengan kontrol sosial dan partisipasi publik secara tidak langsung di dalam kegiatan pemerintahan.¹³

Tujuan-tujuan ekonomi politik (i) menyediakan pendapatan yang cukup banyak atau kebutuhan minimum masyarakat, (ii) mensuplai negara atau persemakmuran dengan pendapatan yang memadai bagi pelayanan-pelayanan publik untuk memperkaya rakyat maupun penguasa. Kemudian Smith menekankan pada “masyarakat” dan pada kegiatan ekonomi mereka sebagai sumber kesejahteraan sangat berlawanan dengan penekanan merkantilis pada negara (pemerintah) sebagai sumber sekaligus penerima manfaat pertumbuhan ekonomi.¹⁴

3.Konflik

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Mengingat adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan dalam pengelolaan, maka adalah rasional untuk menduga akan timbulnya perbedaan-perbedaan pendapat, keyakinan-keyakinan serta ide-ide. Mengingat bahwa konflik tidak dapat dihindari, maka approach yang baik untuk diterapkan adalah pendekatan mencoba memanfaatkan konflik sedemikian rupa, hingga ia tepat serta efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan.¹⁵

¹³Didik Rachbini, 2006, *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Hlm.120-121.

¹⁴ Martin Staniland, 2003, *Apakah Ekonomi Politik Itu ?*. Jakarta:Penerbit Raja Grafindo Persada Hlm.18.

¹⁵ Winardi, 2007, *Manajemen Konflik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm. 1.

¹¹ Herni Marina, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹² Deliarnov, *Op.Cit.*, hlm.12.

Menurut Deny Hidayati konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Hal ini jelas terlihat bahwa konflik merupakan suatu proses sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, namun intensitas dan kompleksitasnya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan hubungan para pihak yang berkonflik. Intensitas konflik berkaitan dengan frekuensi terjadinya suatu konflik, sedangkan kompleksitas konflik berkaitan dengan berapa banyak pihak yang berkonflik dan terlibat dalam penyelesaian konflik pada tingkatan yang berbeda.¹⁶

Pengertian konflik dapat pula dilihat dari empat tipe konflik, yaitu:¹⁷

- a. Konflik laten : konflik yang tersembunyi, sehingga perlu diangkat kepermukaan agar dapat dikelola secara efektif.
- b. Konflik terbuka : konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, karena itu memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi penyebab dan berbagai efeknya.
- c. Konflik di permukaan : konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahan-pahaman mengenai sasaran. Konflik ini dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.
- d. Situasi tanpa konflik : situasi ideal yang dalam kenyataan sehari-harinya mungkin sulit dijumpai, dalam kondisi ini seperti ini semua kelompok atau masyarakat hidup damai.

Sedangkan menurut Isenhardt dan Spangle sumber konflik dapat berasal dari perbedaan data, kepentingan, komunikasi,

prosedur nilai-nilai, hubungan sosial dan struktur peran. Sebuah konflik diantara para pihak bisa saja terjadi karena salah satu faktor, tetapi kenyataannya di lapangan seringkali bersifat multi-faktor.¹⁸

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam bersumber pada:¹⁹

- a. Kompetisi dalam mengakses dan mengontrol pemanfaatan sumber daya.
- b. Efek atau dampak penggunaan sumber daya, ketika tindakan dari satu kelompok mempengaruhi kepentingan kelompok lainnya.
- c. Ketika pemilik sumber daya dan pengontrol sumber daya adalah tidak sama dan jika kemudian preferensinya terikat pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan nilai sumber daya dalam jangka panjang.
- d. Perbedaan kebijakan, tujuan dalam berkelanjutan, efisiensi ekonomi dan pemerataan yang mana kesemuanya itu merupakan komponen dari pembangunan yang terlanjutkan.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, penelitian dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,

¹⁶ Deny Hidayati dkk, 2005, *Manajemen Konflik*. Jakarta: Penerbit Piramida Publishing. Hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

HASIL PENELITIAN

A. Politik Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bintan Antara Pemerintah dan Pihak Asing pada Tahun 2013-2015.

1. Keterlibatan Pihak Asing

Pariwisata selalu dipandang sebagai sektor penting dalam pembangunan wilayah karena terbukti mampu memberikan stimulasi positif dalam pertumbuhan perekonomian dan perbaikan kehidupan sosial, terutama pada daerah sekitar objek wisata dan pada wilayah dalam lingkup yang lebih luas. Ada tiga alasan pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik lokal, regional maupun lingkup nasional. Alasan pertama selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi daerah, pembukaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Kedua untuk pelestarian dan pengembangan objek wisata. Dan ketiga dengan pariwisata akan membuka wawasan masyarakat setempat untuk dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat setempat demi meningkatkan pola pikir kemajuan pada suatu daerah.

Pulau Bintan memiliki sumber daya alam berupa pantai berpasir putih yang terbentang sepanjang $\pm$ 105 km di sisi utara pulau yang langsung menghadap laut Cina Selatan. Kawasan yang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata

Lagoi tersebut bila dikelola dengan baik akan menjadi alternatif tempat wisata yang memiliki nilai jual yang tinggi. Kondisi yang demikian juga disadari oleh Pemerintah Singapura yang menghadapi masalah kejenuhan wisatawan karena dihadapkan pada objek yang sama, sementara Singapura tidak memiliki cukup sumber daya alam untuk ditawarkan kepada wisatawan yang datang ke Singapura. Melihat keunggulan diatas dan dilandasi oleh pengertian saling menguntungkan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura maka dicapai satu kesepakatan untuk bersama-sama mengembangkan kawasan Wisata Lagoi.

Untuk memperkuat kesepakatan diwujudkan dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) yang ditandatangani oleh menteri terkait dari kedua negara dan disaksikan oleh kepala negara, pada tanggal 28 Agustus 1990 di Batam. Kerjasama tersebut meliputi pengembangan pariwisata di Lagoi (Pulau Bintan), kawasan industri Lobam (Pulau Bintan), Kawasan Industri maritim (Kepulauan Karimun) dan pengembangan sumber air (Pulau Bintan).

Realisasi kerjasama tersebut didasari pada filosofi yang saling melengkapi. Singapura yang dipandang sebagai *engine of growth* di kawasan Asia Tenggara memiliki kelebihan dari sisi modal, penguasaan teknologi tinggi, kemampuan managerial, dan kelengkapan infrastruktur. Namun lemah dalam hal persediaan sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja. Indonesia dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Riau dan Karimun memiliki SDA dan dapat menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁰ Sugiyono, *Op.,Cit*, hlm. 244.

asing yang menanamkan modalnya pada kawasan tersebut.

Tabel 3.1
Kerjasama Indonesia-Singapura

Singapura	Indonesia (Kepulauan Riau)
Kelebihan: 1. Memiliki <i>Global Infrastructure</i>. 2. Memiliki <i>managerial Skill</i> yang tinggi. 3. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi. 4. Penguasaan Modal dan kepercayaan investasi dunia. Kekurangan: 1. SDA, lahan dan persediaan air. 2. Tenaga kerja.	Kelebihan: 1. SDA, lahan, dan keindahan alam. 2. Tenaga kerja. 3. Kebudayaan. 4. Pengalaman membangun. Kekurangan: 1. Modal dan <i>managerial skill</i>. 2. <i>World wide trust of invesment</i>.

Sumber: Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Bapak Ign. Haryadi (Pengamat Pariwisata di Bintan) Tahun 2016

Hubungan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bintan dan pihak asing dikuatkan dengan lahirnya peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, membuat kondisi Kawasan Wisata Lagoi di Kabupaten Bintan menjadi kawasan FTZ (Free Trade Zone) atau kawasan perdagangan bebas.

Korelasi yang terjalin antara pemerintah dan pihak PT. BRC khususnya dalam mengelola Kawasan Wisata Lagoi sangat kuat. Di satu sisi Kawasan Wisata Lagoi merupakan aset yang sangat potensial oleh karena itu pemerintah membutuhkan suntikan dana dari investor

Pada proses pengelolaan Kawasan Wisata Lagoi antara pemerintah dan pihak asing pada umumnya berjalan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku hanya saja terkadang terjadinya perbedaan pemikiran antara pemerintah yang juga harus memikirkan kepentingan masyarakat dan pihak asing yang mempunyai pola pikir *businessman* yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam setiap prosesnya misalnya untuk menjaga *echogreen* di Kawasan Wisata Lagoi yang merupakan sasaran empuk bagi pelaku *illegallogging* pembalakan hutan di kawasan tersebut. Pihak PT. BRC mengaku bahwa sampai sekarang *ilegallogging* masih sering terjadi dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menuntaskan hal ini.

2. Konflik Harga Ganti Rugi Tanah Masyarakat

Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Mengingat adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan dalam pengelolaan, maka adalah rasional untuk menduga akan timbulnya perbedaan-perbedaan pendapat, keyakinan-keyakinan serta ide-ide. Mengingat bahwa konflik tidak dapat dihindari, maka approach yang baik untuk diterapkan adalah pendekatan mencoba memanfaatkan konflik sedemikian rupa, hingga ia tepat serta efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan.²¹

Selanjutnya terkait dengan pembebasan lahan di Kawasan Lagoi yang dulu merupakan tanah hak milik rakyat. Harga ganti rugi yang tidak sesuai

²¹ Winardi, 2007, *Manajemen Konflik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. Hlm. 1.

membuat masalah ini berlarut-larut sampai sekarang. Selain itu Pemerintah sendiri tidak ada langkah penyelesaian. Dari 23.000 hektar tanah yang telah diklaim oleh PT. BRC terdapat tanah seluas 7000 hektar yang masih belum jelas kepemilikannya. Menurut Bapak Hermansyah Simatupang, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan, menyatakan bahwa:

“Tanah seluas 7000 hektar belum jelas status kepemilikannya dikarenakan masyarakat sampai saat ini beranggapan bahwa PT.BRC belum mengganti rugi tanah kepemilikannya, sedangkan dari pihak PT. BRC sendiri menyebutkan bahwa mereka tentu saja sudah mengganti rugi tanah tersebut. Masalah ini masih belum ada ujungnya ditambah lagi masyarakat menginginkan harga ganti rugi tanah sesuai dengan harga tanah pada saat ini, yang tentu saja ditolak oleh PT. BRC. Kemudian, sampai saat ini di beberapa lokasi di Kawasan Lagoi masih ada masyarakat setempat yang bertahan tinggal di kawasan tersebut. Sampai saat ini PT. BMW yang menaungi PT. BRC untuk mengelola Kawasan Lagoi ini belum memperbaharui batas izin lokasinya.” (Wawancara bersama Bapak Hermansyah Simatupang pada tanggal 11 Mei 2016).

Lebih lanjut mengenai batas izin lokasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi. Peraturan ini mengatur tentang memperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal atas izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Adapula dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pembebasan lahan di Kawasan Lagoi yang dulu merupakan tanah hak milik rakyat. Harga ganti rugi yang tidak sesuai membuat masalah ini berlarut-larut sampai sekarang. Namun, masyarakat yang merasa belum diganti rugi hak kepemilikan tanahnya sampai saat ini masih bertahan tinggal dalam Kawasan Wisata Lagoi. Masyarakat yang tinggal ditempat ini tidak merasakan pembangunan perbaikan fasilitas dan pembangunan berkelanjutan yang ada di Kawasan Wisata Lagoi.

B. Dampak keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bintan.

1. Dampak Terhadap Masyarakat

a. Lapangan Kerja

Banyak kegiatan yang biasanya ditimbulkan oleh pariwisata pada suatu daerah, akan mendatangkan lebih banyak kesempatan kerja dari suatu sektor ekonomi lainnya. Alasannya karena industri pariwisata umumnya berorientasi pada penjualan jasa. Pernyataan bahwa industri pariwisata itu bersifat pada karya, hal itu tidak dapat dipungkiri. Tetapi kita akan menemukan variasi-variasi dampak industri pariwisata pada kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor:²²

- a. Ciri-ciri khas sistem ekonomi dan kebijakan tenaga kerja daerah tersebut;
- b. Ciri-ciri khas industri pariwisata itu sendiri di negara-

²² Wahab, Ph. D, 1996, *Manajemen*

Kepariwisata, Alih Bahasa: Drs. Frans Gromang, Penerbit PT Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm. 55-56.

negara tersebut. Apakah industri pariwisata itu besar dan terdiri atas usaha-usaha kecil berpola keluarga, atau merupakan badan usaha - badan usaha besar yang mempergunakan sistem manajemen, berciri otomatis dan mempunyai pengontrolan informasi melalui computer, pengaruh musiman dan lain-lain;

- c. Tingkat keterampilan tenaga kerja, efisien dan kelayakan situasi untuk industri pariwisata;
- d. Persaingan antara industri pariwisata dan sektor produksi lain, sejauh menyangkut tingkat pembayaran (gaji dan upah);
- e. Citra produk pariwisata di daerah itu (apakah menarik atau tidak bagi generasi muda yang terpelajar);
- f. Seberapa banyak pekerjaan pariwisata yang diciptakan oleh tiap satuan modal yang ditanam, apakah penanaman modal itu memberi kesempatan kerja dalam pembangunan prasarana pariwisata, pedagang pengecer, pengusaha berdikari dan lain-lain.

Dari faktor di atas bila dikaitkan dengan keterlibatan asing tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda lagi. Kalau pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang tegas mengenai serapan tenaga kerja misalnya saja tenaga kerja di Kawasan Wisata Lagoi tentunya pihak asing tersebut lebih memilih tenaga kerja dari negaranya sendiri atau bahkan dari berbagai negara lain yang memiliki tenaga kerja yang lebih profesional dibanding tenaga kerja lokal dari Kabupaten Bintan.

Seperti yang kita ketahui industri pariwisata Kawasan Wisata Lagoi yang sudah bertaraf internasional merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk ikut serta terjun dalam pengelolaannya dan ikut terserap menjadi tenaga kerja yang mengelola aset wisatanya sendiri. Oleh sebab itu ekonomi politik dapat menengahkan ketegangan yang tentunya sering terjadi dimana individu (pihak asing) terlibat dalam mengejar kepentingan sendiri, sedangkan negara dimana orang-orang yang sama melakukan tindakan kolektif demi kepentingan masyarakat.

Dampak ekonomi politik pariwisata kawasan wisata lagoi terhadap pekerja dan upah, dengan beroperasinya kawasan Lagoi, masyarakat merasakan banyaknya terbuka lapangan pekerja. Hanya saja sebagian besar posisi penting di perusahaan didominasi oleh pekerja asing. Selain itu dinas terkait sendiri tidak mempunyai data pasti berapa jumlah penduduk Bintan yang bekerja di Lagoi.

- b. Konflik Harga Ganti Rugi Tanah

Menurut Deny Hidayati konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Hal ini jelas terlihat bahwa konflik merupakan suatu proses sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, namun intensitas dan kompleksitasnya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan hubungan para pihak yang berkonflik. Intensitas konflik berkaitan dengan frekuensi terjadinya suatu konflik, sedangkan kompleksitas konflik berkaitan dengan berapa banyak pihak yang berkonflik dan terlibat dalam

penyelesaian konflik pada tingkatan yang berebeda.²³

Pembukaan Kawasan Wisata Lagoi memberikan dampak banyaknya terserap tenaga kerja namun dibalik itu terdapat dampak yang merugikan masyarakat yang memiliki sejumlah tanah di Kawasan Wisata Lagoi. Sebagian masyarakat yang merasa dirugikan dengan masalah harga ganti rugi sampai sekarang masih tetap bertahan di kawasan tersebut. Akan tetapi, masyarakat yang tinggal ditempat ini tidak merasakan pembangunan perbaikan fasilitas dan pembangunan berkelanjutan yang ada di Kawasan Wisata Lagoi.

c. Peningkatan kualitas SDM Pariwisata di Bintan

Salah satu modal utama pengembangan pariwisata adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini akan menentukan nilai dan kualitas layanan kepada wisatawan. Sejalan dengan perkembangan kegiatan pariwisata di Bintan sebagai hasil dari upaya pengembangan secara menyeluruh dalam bidang yang bersangkutan akan memunculkan kebutuhan SDM yang lebih besar lagi. Hal ini membuka peluang meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM pariwisata dengan pesatnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Bintan, kebutuhan akan kegiatan pendidikan dan pelatihan demi tercapainya penyediaan SDM yang mampu memenuhi standar pelayanan internasional, utamanya untuk SDM lokal sangat diperlukan sehingga bisa mendukung kegiatan

di bidang kepariwisataan yang semakin meningkat.

Struktur tenaga kerja yang tersedia, utamanya SDM lokal dari masyarakat Bintan, masih didominasi oleh lulusan SMA sekitar 82% dan kualitas fisik SDM pariwisata Kabupaten Bintan pada umumnya masih dalam kondisi rata-rata.²⁴ Karena pesatnya kegiatan pariwisata di Kabupaten Bintan apalagi dengan adanya keterlibatan asing memaksa masyarakat untuk menyesuaikan kemampuan mereka dengan persyaratan yang diperlukan dunia usaha dan industri yang berkembang pesat tersebut. Pendidikan yang diperlukan di bidang kepariwisataan diarahkan kepada tuntutan dan kebutuhan pasar tenaga bidang pariwisata di Bintan yang siap pakai dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa segera bekerja.

Ancaman yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan di bidang kepariwisataan yang pesat tetapi tidak mengakomodir masyarakat setempat adalah kemungkinan adanya konflik sosial antara kelompok penduduk pendatang yang bekerja di industri pariwisata dengan penduduk lokal yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan petani. Oleh karena itu adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM lokal sangat diperlukan untuk memungkinkan mereka ikut terlibat dalam perkembangan kepariwisataan di kawasan tersebut dan mendorong usaha-usaha pemberdayaan masyarakat.

2. Dampak Terhadap Pemerintah

²³ Deny Hidayati dkk, 2005, *Manajemen Konflik*. Jakarta: Penerbit Piramida Publishing. Hlm. 11.

²⁴ Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015. Hlm.3-18

Pariwisata seperti halnya kegiatan ekonomi lain, mendatangkan pendapatan bagi pemerintah dalam bentuk pajak. Segi khusus pariwisata yakni kegiatan ini mendirikan suatu kompleks badan usaha dan bangunan-bangunan yang menghasilkan berbagai pajak (misalnya pajak pendapatan, pajak impor atas berbagai barang yang dipergunakan oleh wisatawan, pajak tanah, pajak penambahan nilai, pajak bermacam izin-izin dan merk dagang, pajak hotel restoran dan lain-lain). Semua ini mendatangkan pendapatan yang tidak sedikit untuk pemerintah daerah. Pihak pengelola asing dalam mengelola Kawasan Wisata Lagoi yang berpendapatan tinggi juga pasti membayarkan pajak yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah. Hal ini tentu saja tidak boleh lepas dari pengawasan pemerintah agar terhindar dari kasus penggelapan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wisata di Kabupaten Bintan yang dilihat dari ketrelibatan asing serta dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan perkembangan pariwisata masih terkonsentrasi di Kawasan Wisata Lagoi yang bersifat *closed system*. Padahal dengan mengoptimalkan kapasitas, kuantitas, sinergitas di antara mata rantai pembentuk industri pariwisata di Kabupaten Bintan yang masih perlu dikembangkan. Korelasi yang terjalin antara pemerintah dan pihak PT. BRC

khususnya dalam mengelola Kawasan Wisata Lagoi sangat kuat. Di satu sisi Kawasan Wisata Lagoi merupakan aset yang sangat potensial oleh karena itu pemerintah membutuhkan suntikan dana dari investor asing yang menanamkan modalnya pada kawasan tersebut. Pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dirasa belum maksimal karena tidak terlihatnya implementasi secara signifikan walaupun sudah dibuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

2. Dampak ekonomi politik pariwisata kawasan wisata lagoi terhadap pekerja dan upah, dengan beroperasinya kawasan Lagoi, masyarakat merasakan banyaknya terbuka lapangan pekerja. Hanya saja sebagian besar posisi penting di perusahaan didominasi oleh pekerja asing. Selain itu dinas terkait sendiri tidak mempunyai data pasti berapa jumlah penduduk Bintan yang bekerja di Lagoi. Dampak yang merupakan ancaman adalah apabila investor menginginkan tenaga kerja asing yang lebih ahli dibanding lokal, oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk mendorong dan meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal.

2.Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Politik Pengelolaan Objek wisata di Kabupaten Bintan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata dan berkerjasama bersama mitra yaitu pihak swasta maupun mereka yang mampu merangkul pelaku industri pariwisata di Kabupaten Bintan untuk lebih maju demi kesejahteraan masyarakat. Tidak untuk hanya diserahkan saja pada pihak lain tapi haruslah menjadi mitra

yang berkerjasama demi pencapaian pembangunannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan yang masih bertumpu pada sektor pariwisata khususnya sumbangan terbesar dari Kawasan Wisata Lagoi dapat ditingkatkan lagi apabila pemerintah melihat dengan baik potensi pariwisata yang dimiliki serta melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung dalam hal ini.

2. Langkah yang diambil oleh pemerintah bisa berupa sosialisasi dan pelatihan dalam bidang kepariwisataan, yang nantinya dapat menaikkan kualitas dan pengolahan potensi agar dapat meningkatkan *added value*. Pemerintah haruslah mendukung dan berpartisipasi untuk memajukan usaha yang telah dibuat oleh masyarakat ini. Selain sebagai pengelola dan pedagang, masyarakat lokal juga dapat diberdayakan sebagai pengelola dan pekerja di resort-resort. Kemudian perlu dibuatnya Kelembagaan Pemasaran Pariwisata guna mendukung dan memajukan objek wisata yang mempunyai potensi di Kabupaten Bintan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alam. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik (Formulasi Kebijakan dalam Konteks yang Berubah)*. Pekanbaru: Penerbit Alaf Riau.

Budiarjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hidayati, Denny. 2005. *Manajemen Konflik*. Jakarta: Penerbit Piramida Publishing.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Gelora Aksara Pratama.

Rachbini, Didik. 2006. *Ekonomi politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Staniland, Martin. 2003. *Apakah Ekonomi Politik Itu?*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media.

Wahab, Salah. 1996. *Manajemen Kepariwisata*, Alih Bahasa: Drs. Frans Gromang, Penerbit PT Pradnya Paramita: Jakarta.

Wasistiono, Sadu. 2003. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Fokusmedia.

Winardi. 2007. *Manajemen Konflik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah

Jurnal:

Herni Marina. 2013. *Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Wisata Lagoi Kabupaten Bintan*. (<http://E-jurnal-ekonomi-politik-kawasan-wisata-lagoi-kabupaten-bintan-Herni-Marina-100565201152.blogspot.com>, diakses 12 November 2015 , 20.51 WIB).

Jurnal Indara Pahlawan, 2014, *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam Penetapan Kawasan Spesial Economis Zone di Wilayah Batam Bintan Karimun (BBK)*. Universitas Riau.

Skripsi:

Jeffry Kusharyadi. 2016. *Pengelolaan Objek Wisata di Kecamatan Siak Kabupaten Siak*. Jurusan Ilmu Administrasi: Prodi Adminitrasi Publik, FISIP, Universitas Riau.

Sumber lainnya:

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bintan, Tahun 2015.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015.

Ejournal-unisma.net. Jaka Waluya, *Dampak Pengembangan Pariwisata*. Tahun 2013.